

Penanganan Banjir Butuh Rp1,6 Triliun



Sumber gambar :

https://static.promediateknologi.id/crop/0x0:0x0/0x0/webp/photo/p2/238/2024/09/04/proyek-drainase-bb_11zon-801404967.jpg

Pemkot Balikpapan diklaim berkomitmen membenahi perbaikan dari hulu hingga hilir DAS Ampal untuk penanganan banjir di kota ini. Dilakukan secara bertahap, dan butuh biaya besar.

Balikpapan – Perbaikan saluran sekunder Balikpapan Baru bagian dari lanjutan proyek penanggulangan banjir Kota Balikpapan. Seperti diketahui, Pemkot Balikpapan melakukan penanganan banjir secara bertahap.

Setelah sebelumnya pemerintah kota melakukan perbaikan DAS Ampal mulai titik *Global Sport*, Perumahan Wika, hingga Jalan MT Haryono Simpang Beller.

Wali Kota Balikpapan Rahmad Mas'ud mengatakan, perbaikan drainase ini bagian dari penanggulangan banjir.

Masalah banjir di Kota Beriman tidak bisa tuntas dalam satu atau dua tahun anggaran. “Itu perlu proses beberapa tahun. Minimal kita sudah mulai bertahap, bukan cuma mimpi. Tapi kita eksekusi,” katanya.

Dia menilai, setidaknya sudah mulai terlihat efek dari perbaikan drainase sebelumnya. “Minimal sekarang kalau banjir berkurang dari sisi ketinggian. Kemudian jalan lebih lebar ini membantu arus lalu lintas,” tuturnya.

Rahmad menjelaskan, Pemkot Balikpapan berkomitmen membenahi perbaikan dari hulu hingga hilir DAS Ampal. Namun dilakukan secara bertahap. Dia menuturkan, total kebutuhan penanganan banjir di Balikpapan sebesar Rp1,6 triliun.

“Kami cicil mulai Rp136 miliar dulu,” ucapnya. Dia memberi pemahaman, bahwa proyek yang dikerjakan kemarin baru sekitar 10 persen dari total kebutuhan penanganan banjir.

“Jadi jangan mimpi dulu banjir tuntas, tapi yang penting sudah mulai *action* daripada selama ini diam saja,” imbuhnya.

Sementara itu, tahun ini proyek pengendalian banjir di Kota Minyak berlanjut lagi. Kali ini titik pekerjaan pembangunan sistem drainase perkotaan, khususnya saluran sekunder Balikpapan Baru.

Perbaikan saluran sekunder Balikpapan Baru ini melanjutkan perbaikan drainase dari Perumahan Wika. Aliran air masuk ke saluran sekunder Balikpapan Baru. Dinas Pekerjaan Umum (PU) melakukan pelebaran saluran sesuai masterplanⁱ.

“Awalnya eksistingⁱⁱ lebar saluran 3,4 meter menjadi 7 meter. Perbaikan saluran sampai jembatan bungkuk,” kata Kepala Bidang SDA dan Drainase Dinas Pekerjaan Umum Jen Supriyanto.

Tujuan pelebaran saluran sekunder agar bisa menampung air lebih banyak. Mengingat kemampuan tampungan sekarang masih kecil. Itu yang membuat air bisa meluap dan banjir saat debit air tinggi.

“Sebab aliran air masuk Jalan Boulevard dan Gang Bunga Kantil. Tapi ini salurannya mengecil,” ucapnya. Jen menjelaskan, saluran yang berada di perumahan ini sudah tidak bisa diperbaiki karena mepet dengan bangunan.

Baik sebelah kiri dan kanan semua terhimpit bangunan rumah. Mengatasi masalah ini, pihaknya berupaya dengan melebarkan saluran sekunder Balikpapan Baru. Sehingga bisa menampung air sementara.

“Harapannya ketika debit air besar, air bisa tertampung dulu di saluran drainase sekunder,” tuturnya. Dia meyakini, pelebaran saluran sekunder Balikpapan Baru bakal signifikan menampung air terlebih dulu.

Hingga akhirnya air masuk ke saluran Inhutani, seterusnya terbuang ke hilir DAS Ampal. Jen menambahkan, proyek saluran sekunder Balikpapan Baru termasuk perbaikan bendungan pengendali (bendali). Sebab struktur bendali saat ini sudah rusak.

“Jadi kami perbaiki bendali juga agar tampungan air maksimal,” sebutnya. Termasuk membersihkan sedimentasi. Adapun proyek saluran sekunder Balikpapan Baru memiliki tenggat waktu hingga Desember, pekerjaan sekitar enam bulan.

Alokasi anggaran proyek sebesar Rp9,98 miliar, berasal dari APBD Balikpapan 2024. Proyek ini memiliki waktu pekerjaan selama 183 hari dengan kontraktor pelaksana CV Maranginang dan pengawas CV Rizky Utama Teknik. (ms)

Sumber berita:

1. Kaltim Post, Penanganan Banjir Butuh Rp1,6 Triliun, 5/9/2024

Catatan:

1. Berdasarkan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 12 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Sistem Drainase Perkotaan, penyelenggaraan sistem drainase perkotaan menjadi tanggung jawab Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya.
2. Dalam Pasal 95 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Wali Kota Balikpapan Nomor 22 Tahun 2021 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kota Balikpapan Tahun 2021-2041 diatur sebagai berikut:
 - (1) Jaringan sumber daya air meliputi sistem pengendali banjir.
 - (2) Sistem pengendali banjir dikembangkan melalui pengembangan bangunan pengendali banjir berupa bendungan pengendali banjir (bendali).

ⁱ Dikutip dari <https://www.kbbi.web.id/masterplan>, masterplan adalah rencana. Dalam konteks perencanaan pembangunan, masterplan adalah produk perencanaan yang mencakup infrastruktur maupun non-infrastruktur.

ⁱⁱ Dikutip dari <https://testindo.co.id/eksisting>, Dalam konteks pemeliharaan, eksisting sering digunakan untuk menggambarkan bangunan, infrastruktur, atau fasilitas yang sudah ada dan memerlukan perawatan atau pemeliharaan agar tetap berfungsi dengan baik.